

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Kebudayaan

Sebelum memahami lebih jauh tentang kerajinan tenun sebagai kegiatan usaha tradisional, terlebih dahulu dipahami bahwa karya tenun tersebut merupakan hasil karya seni yang memiliki nilai seni yang cukup mendalam dan tidak terlepas dari produk budaya. Oleh sebab itu penulis perlu memasukkan definisi kebudayaan sebagai pelengkap landasan teori dari penulisan karya ilmiah ini.

Dalam konteks kebudayaan, sesungguhnya menyentuh sebuah konsep yang memiliki ruang cakupan sangat luas, dan dengan begitu banyak definisi mengenai apa itu kebudayaan, maka salah satu definisi yang cukup menggambarkan secara lengkap mengenai kebudayaan dikemukakan oleh seorang ahli antropologi Indonesia sebagai berikut: kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat 1994:5-6).

Untuk memahami kebudayaan yang memang luas ruang cakupannya, Koentjaraningrat mengklasifikasikan semua pemahaman tersebut dalam dua dimensi yang di istilahkan sebagai wujud kebudayaan dan isi kebudayaan. Dari dimensi wujud, kebudayaan dipandang sebagai:

1. Suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya.

2. Suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat yang dapat di observasi.
3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dari segi isi kebudayaan, Koentjaraningrat menyebutkan adanya tujuh buah unsur yang terhisap kedalamnya: bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian.

Kebudayaan baik sebagai sistem makna maupun sistem nilai terus-menerus berubah. Kebudayaan berubah karena individu dalam masyarakat yang adalah arsitek dari kebudayaan selalu memodifikasikan rencana untuk mencapai hidup yang lebih baik, selalu berusaha memperbaiki tingkah lakunya sesuai dengan pengalaman yang dihadapinya dalam lingkungan fisik, sosial dan ide-ide yang terus menerus berubah.

Uraian dari Koentjaraningrat cukup memberi peluang kepada penulis untuk menempatkan obyek penelitian ini dalam kategori budaya yang bersifat dinamis dan mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan membicarakan kain tenunan sebagai produk budaya patutlah memperhatikan faktor kebutuhan manusia yang bersifat universal, meliputi kebutuhan sosial, dan ekonomi.

2.2 Pengertian Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai pada hampir semua negara di dunia ialah inflasi. Inflasi di definisikan sebagai suatu proses

kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian (Sukirno, 1999:15).

Inflasi di definisikan sebagai suatu periode dimana kekuatan membeli kesatuan moneter menurun atau terjadi kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa (secara umum) secara terus menerus. Jika kenaikan harga barang dan jasa hanya dari satu atau beberapa macam tidak dapat dikatakan terjadi inflasi, begitu juga barang dan jasa bersifat kejutan (sekali waktu atau musiman) seperti pada hari raya Islam dan Natal, tidak dapat dinamakan inflasi (Kusnadi, 1997:276).

Inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya-biaya umum naik; harga beras, bahan bakar, mobil naik; tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik (Samuelson, 1991:296).

Menurut beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa inflasi pada dasarnya merupakan perubahan tingkat harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam rentang waktu tertentu.

2.3 Jenis-Jenis Inflasi

Ada berbagai cara menggolongkan jenis-jenis inflasi, yaitu penggolongan inflasi berdasarkan derajat keparahan, tingkat perbedaan kualitatif dan asal inflasi.

- a. Penggolongan pertama didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut, dibedakan menjadi empat macam yaitu:
 - 1) Inflasi tingkat ringan, yaitu jika tingkat inflasi dibawah 10% setahun.
 - 2) Inflasi tingkat sedang, yaitu tingkat inflasi diatas 10% sampai dengan 30% setahun.

- 3) Inflasi tingkat berat, yaitu tingkat inflasi diatas 30% akan tetapi masih dibawah 100%.
- 4) Inflasi tingkat parah, yaitu inflasi yang terakhir dikenal pula dengan nama hiperinflasi, dimana tingkat inflasi diatas 100%.

Penentuan parah atau tidaknya inflasi suatu negara tentu saja sangat relatif dan tergantung pada selera tiap orang untuk menentukannya. Sebenarnya tidak dapat menentukan derajat keparahan inflasi hanya dari sudut pandang laju inflasi tersebut, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa penanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Kalau seandainya laju inflasi adalah sebesar 20%, semuanya berasal dari kenaikan harga barang-barang yang dibeli oleh golongan dengan penghasilan rendah, maka seharusnya dinamakan inflasi yang parah (Kusnadi, 1997:227).

- b. Penggolongan inflasi yang kedua atas dasar perbedaan kualitatif, yaitu penggolongan yang didasarkan pada perbedaan keadaan, dalam hal ini inflasi dibagi dalam tiga tahap yaitu:

- 1) Inflasi moderat.

Bentuk inflasi ini terjadi ketika harga-harga meningkat dengan perlahan-lahan. Masyarakat dapat menyatakan inflasi ini berdasarkan moderat apabila angkanya masih dibawah 10% pertahun (inflasi satu angka atau satu digit). Dalam situasi inflasi moderat harga barang-barang relatif tidak akan bergerak jauh menyimpang. masyarakat tidak akan terlalu banyak berpikir dalam menggunakan uang karena tingkat suku bunga riil tidak terlalu rendah. Tingkat suku bunga riil adalah tingkat suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi. Apabila laju inflasi rendah maka uang

yang biasanya berbunga nominal hampir mendekati nilai maksimal menghasilkan suku bunga riil sedikit negatif. Dengan demikian uang masih mempunyai sebagian besar nilainya dari tahun ke tahun. Selain itu harapan yang timbul dari masyarakat relatif stabil dan orang tidak khawatir dalam melakukan transaksi dengan nilai nominal (Samuelson, 1991:299).

2) Inflasi menengah (*Gallopning Inflation*).

Bentuk inflasi ini terjadi jika harga-harga melonjak 20, 100 atau 200% pertahun, artinya inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau *triple digit*), inflasi ini sering disebut inflasi dua / tiga angka / digit. Pada umumnya sebagian besar kontrak-kontrak transaksi dikaitkan dengan indeks harga atau mata uang asing, misalnya dollar, uang kehilangan nilainya begitu cepat dimana uang memperoleh tingkat bunga riilnya sebesar negatif 50 atau 100% pertahun, karena itu masyarakat tidak mau lagi menyimpan uang lebih dari jumlah minimum yang dibutuhkan. Pasar uang akan semakin memburuk, dan dana biasanya dialokasikan lebih dengan cara penjataan ketimbang perhitungan suku bunga. Masyarakat berlomba-lomba menimbun barang, membeli rumah, tanah dan tidak akan pernah meminjamkan uang dengan suku bunga yang biasa (Samuelson, 1991:301).

3) Hiperinflasi.

Bentuk inflasi ketiga yang sangat mematikan disebut hiperinflasi. Adapun ciri-ciri hiperinflasi adalah: **Pertama**, kecepatan perputaran

uang (yaitu betapa cepat uang dibelanjakan begitu diterima) meningkat sangat besar, misalnya uang akan berputar lebih dari 30 kali lebih cepat dari awal periode. **Kedua**, Harga-harga relatif menjadi sangat tidak stabil. Biasanya upah riil seseorang hanya berubah 1% atau bahkan kurang dari bulan-kebulan (Samuelson, 1991:303).

- c. Penggolongan inflasi yang ketiga adalah berdasarkan asal inflasi, disini inflasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*).

Inflasi domestik adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri, penyebab inflasi domestik ini berasal dari bencana alam, bencana sosial, gagal panen industri pertanian atau karena adanya defisit (kekurangan) anggaran belanja negara yang di ikuti dengan pencetakan uang baru serta adanya berbagai faktor lainnya.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*).

Inflasi yang berasal dari luar negeri ialah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan dagang negara yang bersangkutan. Kenaikan harga barang-barang yang di impor mengakibatkan: **Pertama**, secara langsung pada kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor. **Kedua**, secara tidak langsung akan menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dan kemudian harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus di impor (*cost inflation*). **Ketiga**, secara tidak langsung akan menimbulkan kenaikan harga dalam negeri karena

kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga barang impor tersebut (*demand inflation*) (Boediono, 1996:162).

2.4 Akibat Inflasi

Inflasi akan membawa dampak terhadap perekonomian suatu negara. Adapun akibat buruk dari inflasi di bedakan dalam dua aspek yaitu: akibat buruk kepada perekonomian dan akibat buruk kepada individu-individu / masyarakat.

a. Akibat Buruk Kepada Perekonomian

Inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif dari para pemilik modal, dimana mereka cenderung membeli rumah, tanah, dan menyimpan barang-barang berharga yang lebih menguntungkan ketimbang melakukan investasi produktif, disamping itu meningkatnya suku bunga menyebabkan menurunnya minat investor menginvestasikan modalnya kepada sektor-sektor produktif tersebut. Akibat buruk lainnya, inflasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidak pastian mengenai keadaan ekonomi dimasa depan sehingga sulit diramalkan dengan baik, keadaan ini akan mengurangi gairah pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Akibat buruk lainnya dalam perekonomian yaitu menimbulkan masalah terganggunya neraca pembayaran, dimana inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah di bandingkan dengan produk dalam negeri sehingga inflasi menyebabkan impor berkembang lebih cepat tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan lebih lambat. Disamping itu aliran modal yang keluar akan lebih banyak dari pada

yang masuk kedalam negeri dan cenderung memperburuk keadaan neraca pembayaran, hal ini seterusnya dapat menimbulkan kemerosotan nilai mata uang (Sukirno, 1999:307).

b. Akibat Buruk Kepada Individu Dan Masyarakat

Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan contohnya dalam masa inflasi harta-harta tetap seperti rumah, tanah, bangunan pabrik mengalami peningkatan harga adakalanya lebih cepat dari inflasi itu sendiri. sebaliknya sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki harta dan berpendapatan rendah mengalami kemerosotan pendapatan riilnya, dengan demikian inflasi memperlebar ketidak samaan distribusi pendapatan. Dalam situasi inflasi bagi sebagian masyarakat yang berpenghasilan tetap, peningkatan harga sering mendahului kenaikan pendapatan sehingga inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan riil, dengan demikian menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya bagi para pemegang uang tunai dan masyarakat yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito atau tabungan di institusi keuangan pada masa inflasi **akan** mengalami kemerosotan nilai riilnya (Sukirno, 1999:308).

2.5 Cara Mencegah Inflasi

Dalam perekonomian suatu bangsa, suatu negara akan berusaha mencapai suatu titik keseimbangan (ekuilibrium) ekonomi baik dipasar uang dan barang, yang dipengaruhi oleh variabel-variabel serta faktor-faktor mekanisme pasar. Bila mekanisme pasar dapat berjalan tanpa hambatan, maka keseimbangan di pasar akan terjadi dan laju inflasi dapat diperkecil, namun tidak jarang mekanisme pasar

tersebut tidak dapat bekerja seperti yang diharapkan, untuk itu pemerintah perlu mengambil tindakan atau langkah-langkah tertentu yang dapat mempengaruhi besaran atau variabel perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi dengan menggunakan segala instrumen ekonomi. Kebijakan ekonomi pada umumnya mempunyai dua karakteristik, yaitu kebijakan ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekonomi ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbesar atau untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Kebijakan ini diambil ketika keadaan perekonomian menghadapi banyaknya pengangguran (rendahnya kesempatan kerja) dan ditandai dengan besaran tabungan lebih tinggi dari pada besaran investasi. Tujuan akhir dari kebijakan ekspansif ini adalah menaikkan tingkat pendapatan nasional dan menaikkan pula tingkat kapasitas produksi nasional. Kebijakan ekonomi kontraktif adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menurunkan atau memperkecil kegiatan ekonomi. Kebijakan ini diambil ketika kondisi perekonomian dalam *overheated* (terlalu cepat) sehingga kenaikan permintaan agregatif jauh lebih besar dari kapasitas produksi nasional. Kondisi ini ditandai ketika besaran investasi lebih besar bila dibandingkan dengan besaran tabungan. Pada kondisi seperti ini umumnya keadaan perekonomian suatu negara dalam keadaan yang berkelanjutan. Tujuan akhir dari kebijakan kontraktif ini adalah untuk menurunkan tingkat pendapatan nasional dan menurunkan pula tingkat produksi nasional (Nopirin, 1996:34)

Adapun berbagai kebijakan ekonomi itu antara lain:

- a. Melalui Kebijakan Moneter

Kebijaksanaan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang juga mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun faktor-faktor tersebut diluar kontrol pemerintah sedangkan kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dapat mempengaruhi besaran atau variabel ekonomi moneter jalannya roda perekonomian guna mencapai tujuan-tujuan yang dapat ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya tujuan kebijakan ekonomi moneter adalah dicapainya keseimbangan interen (*internal balance*) dan keseimbangan eksternal (*external balance*). Kebijakan eksternal biasanya diwujudkan oleh tercapainya keseimbangan kerja yang tinggi, tercapainya pertumbuhan ekonomi dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Disisi lain keseimbangan eksternal ditujukan agar neraca pembayaran internasional (*Balance of Payment*) seimbang dalam arti bahwa neraca pembayaran internasional suatu negara tidak defisit atau surplus, sedangkan indikator kebijakan moneter adalah variabel ekonomi yang memberikan informasi tentang gerakan atau perubahan dalam sektor riil apakah sudah bergerak kearah sasaran yang diinginkan atau belum, sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Dengan adanya pengaturan jumlah uang beredar secara efektif diharapkan laju inflasi dapat ditekan. Bila jumlah uang yang beredar meningkat maka tingkat inflasi meningkat begitu pula sebaliknya. Salah satu komponen uang yang beredar adalah uang giral (*demand deposit*). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara,

pertama jika seseorang memasukan uang kas ke bank dalam bentuk giro, dan kedua apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima dalam bentuk kas. Bank sentral dapat mengatur uang giral ini melalui penetapan cadangan minimum (*reserve requirement*). Untuk dapat menekan laju inflasi, pemerintah melalui bank sentral meningkatkan cadangan minimum bagi bank umum oleh pemerintah (Bank Sentral) sehingga jumlah uang yang beredar menjadi lebih kecil. Cadangan minimum perbankan adalah bagian (persentase) tertentu yang harus disimpan di bank sentral, bagian yang ditahan ini tidak boleh dipinjamkan (Insukrindo, 1996:215-216).

Disamping cara ini bank sentral menggunakan apa yang disebut dengan *discount rate*. *Discount rate* adalah tingkat *discount* untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum. Pinjaman biasanya berwujud tambahan cadangan bank umum yang ada pada bank sentral. Berdasarkan hal ini bagi bank umum merupakan biaya untuk pinjaman yang diberikan makin kecil sehingga cadangan pada bank sentral semakin kecil akibatnya kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat makin kecil sehingga jumlah uang yang beredar turun dan inflasi dapat dicegah (Nopirin, 1996:34).

Instrumen lain yang dapat dipakai untuk mencegah inflasi adalah operasi pasar terbuka (*open market operation*) yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara menjual-belikan surat-surat berharga, misalnya SBI dan surat berharga pasar uang (SBPU). Dengan cara menjual surat berharga bank sentral dapat menekan jumlah uang yang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah. Adapun kebijakan moneter Indonesia dipengaruhi oleh

faktor-faktor ekonomi seperti aktiva luar negeri, tagihan ke pemerintah, kredit dan faktor lain (bersih), sedangkan instrumen pemerintah terdiri atas tiga hal yaitu instrumen kuantitas seperti operasi pasar terbuka melalui SBI atau SBPU dan fasilitas diskonto. Instrumen yang kedua melalui instrumen harga yaitu kebijakan pemerintah melalui *rate referends*, dan instrumen ketiga melalui kebijakan nilai tukar. Ketiga instrumen pemerintah tersebut digunakan untuk mencapai ketiga sasaran yaitu sasaran segera, sasaran lanjutan dan sasaran akhir. Yang dimaksud dengan sasaran segera adalah sasaran ekonomi melalui instrumen kuantitas agar dapat mempengaruhi jumlah uang beredar melalui jumlah M1 dan M2, sedangkan sasaran segera dari instrumen harga adalah suku bunga antar bank melalui tingkat suku bunga deposito. Kredit dan sasaran segera dari kebijakan nilai tukar adalah nilai tukar valuta antar bank melalui keseimbangan nilai tukar. Ketiga macam sasaran ini mempunyai tujuan akhir terhadap pertumbuhan produk nasional bruto (PDB), menurunkan laju inflasi, dan mencapai keseimbangan neraca pembayaran (*balance of payment*) (Insukrindo, 1997:215).

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal antara lain: meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan stabilitas harga yang semuanya mengarah kepada stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi

dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta peningkatan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga laju inflasi dapat ditekan. Disamping itu alat kebijakan fiskal lainnya terdiri dari anggaran defisit (*financing fiscal deficit*). Pemindahan pembayaran (*transfer payment*) pada anggaran defisit pada umumnya diterapkan pada saat terjadinya depresi, sedangkan pada saat inflasi biasanya diterapkan anggaran surplus, pada keadaan stabil ditempuh anggaran yang seimbang (Kusnadi, 1996:289).

c. Kebijakanaksanaan Yang Berhubungan Dengan Output

Kenaikan output dapat mempekecil laju inflasi, Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai dengan kebijaksanaan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga (Nopirin, 1996:34).

d. Kebijakanaksanaan Penentuan Harga Dan Indexing

Kebijakan ini dilakukan dengan penentuan ceiling harga, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu, untuk gaji atau upah (dengan demikian gaji atau upah secara riil tetap). Kalau indeks harga meningkat maka gaji atau upah juga meningkat (Nopirin, 1996:35).

e. Kebijakanaksanaan Yang Berhubungan Dengan Investasi

Pelaksanaan kebijakan mengurangi inflasi bukanlah pekerjaan yang mudah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya selalu menimbulkan bertambahnya pengangguran. Pengurangan pertumbuhan permintaan agregat melalui pengurangan ekspansi moneter jelas membatasi pertambahan pembiayaan investasi. jikalau pertumbuhan pertambahan investasi dibatasi, maka

pertumbuhan kesempatan kerja juga dibatasi demikian juga halnya pembatasan pertumbuhan permintaan melalui pembatasan pertumbuhan pembelanjaan pemerintah. apabila pertumbuhan pembatasan belanja pemerintah dibatasi maka pertumbuhan investasi di sektor pemerintah dibatasi pertumbuhannya, akibatnya industri-industri yang menggantungkan hidupnya dari pembelanjaan pemerintah menjadi terhambat, sehingga dampak lainnya pertumbuhan kesempatan kerja juga ikut terhambat. Melihat kepada masalah-masalah ini, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan menurunkan laju inflasi biasanya juga di iringi dengan adanya kebijaksanaan yang mendorong investasi, misalnya di iringi dengan kebijaksanaan perpajakan yang lebih menggairahkan kegiatan usaha (Sritua, 1996:248)

2.6 Teori-Teori Inflasi

Ada beberapa teori tentang inflasi. Perkembangan unsur-unsur yang mengakibatkan gejala-gejala peningkatan harga-harga adalah suatu hal yang sangat menarik karena itu diperlukan landasan dari berbagai teori tentang inflasi. Adapun teori-teori inflasi dibagi menjadi sembilan bagian yaitu:

a. Teori Inflasi Yang Menekankan Segi Permintaan (*Demand-Pull Theory*)

Teori ini menekankan perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat harga dengan bantuan gap (celah) inflasioner dan gap deflasioner. Dikatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat harga disebabkan karena adanya perubahan pada permintaan total. Suatu kenaikan pada permintaan total dalam situasi kurang lebih mencapai *w// employment* akan menyebabkan terjadinya permintaan yang berlebihan pada banyak pasar individual dan

harga-harga akan meningkat. Bertambahnya permintaan akan barang-barang dan jasa-jasa akan menyebabkan bertambahnya permintaan akan faktor-faktor produksi dan harga-harga mereka akan meningkat pula ke atas. Jadi, inflasi pada harga-harga barang-barang konsumsi dan faktor-faktor produksi timbul karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan berada dalam situasi *full employment* (Winardi, 1995:239).

b. Teori Inflasi Yang Menekankan Segi Penawaran (*Supply-Side Theories of Inflation*)

Teori-teori inflasi yang menekankan segi penawaran menganggap bahwa pergeseran-pergeseran yang terjadi pada kurva *supply* total merupakan akibat yang menyebabkan timbulnya suatu inflasi. Inflasi-Inflasi yang timbul karenanya dinamakan:

- 1) *Cost-Push Inflation* (Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya)
- 2) *Supply-Shock Inflation* (Inflasi karena kejutan Suplai).

Berbagai teori inflasi yang menekan segi penawaran berbeda satu sama lainnya, dalam hal asumsi mereka tentang apa yang merupakan penyebab pokok. Adapun penyebabnya adalah: upah, harga-harga domestik, harga-harga barang-barang impor, atau kekakuan-kekakuan struktural (Winardi, 1995:240).

c. Inflasi Yang Menekankan Kenaikan Upah (*Wage Cost-Push Inflation*)

Teori inflasi yang menekankan kenaikan upah menyatakan bahwa kenaikan pada biaya-biaya upah yang tidak berkaitan dengan kelebihan permintaan merupakan sebab yang mengakibatkan mulainya suatu inflasi. serikat-serikat buruh yang kuat menuntut kenaikan upah sekalipun tidak terdapat kelebihan

permintaan akan tenaga kerja. Menurut teori ini, para majikan memenuhi tuntutan tersebut dan biaya upah yang lebih tinggi kemudian dilimpahkan kepada para konsumen melalui harga-harga yang lebih tinggi. Jadi sebab pokok inflasi adalah kekuatan serikat buruh dikombinasi dengan kuat atau lemahnya pihak majikan terhadap tuntutan kaum buruh, maka kenaikan harga-harga timbul dari segi biaya dan bukan dari segi permintaan perekonomian yang bersangkutan (Winardi, 1995:241).

d. Inflasi Karena Dorongan Harga (*Price Push Inflation*)

Apa yang dinamakan *The Price-Push* atau *Administered Price Theory of Inflation* serupa dengan *The Wage Cost-Push Theory*. Teori ini memprediksi urutan kejadian yang sama seperti teori *Wage Cost-Push*, tetapi penyebabnya adalah perusahaan-perusahaan dan bukan serikat-serikat buruh. Teori tersebut menyatakan bahwa para penjual memiliki kekuatan monopoli dan mereka sangat berkeinginan untuk menaikkan harga-harga, tetapi mereka agaknya kurang berani melakukannya karena mereka takut menghadapi tindakan-tindakan yang bersifat anti-trust, pendapat masyarakat yang menentangnya, pengaturan harga-harga dari pihak pemerintah. Dalam situasi demikian, kenaikan biaya dapat dijadikan alasan atau dalih untuk menaikkan harga-harga. Sewaktu perundingan upah berlangsung, misalnya para penjual memenuhi tuntutan kenaikan upah, dan hal itu kemudian digunakan sebagai alasan untuk menaikkan harga-harga dengan persentase lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk menutup kenaikan dalam biaya upah (Winardi, 1995:243).

e. Inflasi Yang Timbul Karena Meningkatnya Harga Barang-Barang Impor
(*Import Cost-Push Inflation*)

Inflasi terjadi karena kenaikan tingkat harga pada suatu negara ditimbulkan dari kenaikan harga barang-barang impor. Teori tersebut mendasarkan diri pada kaitan-kaitan (*Linkages*) antara negara yang timbul karena perdagangan internasional. Sebuah *Demand Pull Inflation* pada negara A misalnya menyebabkan meningkatnya semua harga-harga, termasuk pula harga barang-barang eksportnya. Apabila negara B menggunakan ekspor negara A, maka *Demand-Pull Inflation* negara A menjadi *Import-Cost Inflation* negara B. harga-harga ekspor negara A mungkin pula meningkat karena alasan-alasan lain dari pada inflasi umum yang terjadi pada negara A. Sewaktu OPEC menaikkan harga minyak bumi, maka hal tersebut menyebabkan terjadinya inflasi *Import Cost-Push* pada negara-negara yang mengimpor minyak bumi (Winardi, 1995:243).

f. Inflasi Karena Kekakuan Struktural (*Structural Rigidity Inflation*)

Teori inflasi karena kekakuan struktural mengasumsikan bahwa sumber sumber daya tidak bergerak secara cepat dari penggunaan satu ke penggunaan lain dan lebih mudah menaikkan upah berupa uang dan harga-harga, tetapi sulit untuk menurunkannya. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut apabila pola permintaan dan biaya berubah, penyesuaian-penyesuaian riil terjadi secara lambat sekali. Pada sektor-sektor yang berekspansi secara potensial timbul kekurangan-kekurangan dan harga-harga meningkat oleh karena gerakan sumber-sumber daya secara lambat menghalangi sektor-sektor tersebut berekspansi dengan cepat. Sektor-sektor yang berkontraksi tidak

menggunakan faktor-faktor produksi secara penuh karena mobilitas rendah pada perekonomian yang bersangkutan, hal ini disebabkan upah dan harga-harga mereka bersifat kaku maka tidak ada penurunan upah dan harga-harga secara berarti pada sektor-sektor tersebut yang berkontraksi. Jadi, proses penyesuaian didalam suatu perekonomian dimana terdapat kekakuan-kekakuan struktural menyebabkan timbulnya inflasi (Winardi, 1995:244).

g. Teori Inflasi Yang Menekankan Segi Permintaan Dan Segi Penawaran
(*Demand-Supply Theories of Inflation*)

Teori-teori dalam kelompok ini menganggap bahwa inflasi semula timbul karena pergeseran-pergeseran pada permintaan total tetapi inflasi tersebut berlangsung terus oleh karena adanya pergeseran-pergeseran pada suplai total, lama setelah kurva permintaan total telah di stabilisasi (Winardi, 1995:245).

h. Inflasi Ekspektasional

Teori inflasi ekspektasional menyatakan bahwa inflasi tergantung pada sekelompok umum ekspektasi tentang kenaikan harga dan upah. Misalnya perusahaan-perusahaan dan serikat buruh menduga bahwa di tahun mendatang akan terjadi inflasi sebesar 10%, maka serikat buruh cenderung akan memulai perundingan-perundingan dengan dasar kenaikan 10% dalam upah berupa uang (yang akan menyebabkan upah riil mereka tetap konstan). Mereka akan menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan mampu membayar 10%, kenaikan upah tersebut dari hasil ekstra yang akan diperoleh mereka karena harga-harga produk akan meningkat dengan 10%. Tetapi perdebatan antara serikat buruh

dan perusahaan-perusahaan akan berkisar sekitar persoalan berapa banyak upah dapat meningkat melebihi angka 10%. Dalam hubungan ini, laba; produktivitas; kekuatan perundingan akan memainkan peranan penting. Disebabkan oleh karena serikat buruh dan pihak manajemen perusahaan memperkirakan inflasi sebesar 10% (atau angka lain), maka perilaku mereka dalam bidang penetapan upah dan harga-harga akan cenderung menyebabkan timbulnya laju inflasi, terlepas dari bagaimana situasi moneter dan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Bahaya inflasi ekspektasional adalah dapat menyebabkan timbulnya suatu *Demand-Pull Inflation* yang telah berlangsung beberapa tahun lamanya, untuk terus berlangsung lama setelah kausa orisinal inflasi telah ditiadakan. Setelah ekspektasi inflasioner mulai berakar, maka tidak mudah untuk memaksakan para pengambil keputusan untuk merevisi ekspektasi mereka ke bawah sekalipun ada kebijaksanaan fiskal dan moneter yang berubah. Inflasi ekspektasional tergantung pada perbandingan-perbandingan ke masa yang akan datang. Para pihak yang menentukan upah dan harga-harga membuat ekspektasi tentang apa yang mereka duga akan menyatakan tingkat harga umum dan kemudian mereka menentukan harga berapa atau uang atau upah mereka sehubungan dengan tingkat harga yang menurut keyakinan mereka terjadi pada masa mendatang. Maka cara yang paling tepat bagi pemerintah untuk memerangi inflasi *ekspektasional* adalah mengusahakan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan ekspektasi masyarakat tentang kenaikan pada tingkat harga di masa depan, seperti melalui himbauan-himbauan ataupun penjelasan tentang keadaan perekonomian kepada masyarakat. Salah satu perbedaan pokok

antara suatu inflasi ekspektasional dan sebuah *Wage Cost-Push Inflation* adalah bahwa inflasi ekspektasional dapat menyebabkan inflasi yang sedang berlangsung bertahan, sedangkan inflasi yang kedua dapat menimbulkan inflasi baru (Winardi, 1995:246).

i. Inflasi Inersial

Inflasi inersial adalah tendensi bagi sebuah laju inflasi apabila sudah berlangsung untuk menetap karena inersialnya sendiri sekalipun kausa orisinal yang menyebabkannya telah ditiadakan. Kekuatan-kekuatan Inersial agak lebih luas di bandingkan dengan ekspektasi inflasi di masa mendatang. Menurut teori inersial, para pengusaha dan buruh akan selalu memperhatikan tingkat harga dan upah dari kegiatan ekonomi di sekitarnya serta membandingkannya dengan masa lampau, dan selalu mendasarkan pada tingkat harga dan tingkat upah relatif untuk menentukan kebijaksanaan harga. Apabila sekali terlihat ada perubahan dalam harga relatif, maka mereka akan bertindak searah dengan perubahan tersebut. Inflasi inersial akan dapat terhenti atau berkurang, apabila keadaan perekonomian mulai melemah dan mengarah pada keadaan resesi dimana terjadi kelesuan harga sehingga mayoritas pihak yang menentukan upah dan harga-harga bersedia untuk menurunkan upah serta harga-harga mereka. Dengan melihat pada proses terjadinya ekspektasi, maka berdasarkan teori adaptif (*The Theory Of Adaptive Expectations*) yang mengasumsikan bahwa anggapan masyarakat tentang laju inflasi di masa depan didasarkan atas observasi laju inflasi pada masa lampau. Maka kedua teori tersebut sangat mirip dan sukar dibedakan akan tetapi, bila dilihat dari teori ekspektasi rasional (*Rational Expectation*

Theory) tentang proses terbentuknya ekspektasi yang mengasumsikan bahwa masyarakat akan bertindak rasional dengan melihat pada kebijaksanaan ekonomi pemerintah ataupun perkembangan perekonomian untuk memperkirakan laju inflasi masa depan. Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara kedua teori inflasi tersebut (Winardi, 1995:247).

2.7 Teori Uang Beredar

Pengertian sempit dari definisi uang adalah uang kertas dan uang logam yang ada ditangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal atau dalam bahasa Inggris dinamakan *currency*. Para ekonom klasik condong mengartikan uang beredar sebagai *currency*, karena uang inilah yang benar-benar merupakan daya beli yang langsung dapat digunakan (dibelanjakan) sehingga langsung mempengaruhi harga barang-barang (terkait langsung dengan pasar barang). Pengertian uang beredar sebagai uang kartal tersebut sudah makin di tinggalkan dengan semakin berkembangnya peranan bank dalam perekonomian sehingga sudah banyak dari masyarakat umum yang menyimpan uang tunainya di bank-bank, demi keselamatan atau untuk kemudahan-kemudahan lain, dalam bentuk rekening koran atau rekening giro. Bagi pemilik rekening koran / giro tersebut, sebenarnya tidak ada bedanya antara uang kertas yang dipegang dan uang yang di simpan dalam bank berupa saldo rekening koran / giro, karena sewaktu-waktu simpanan tersebut dapat diambil kembali untuk dibelanjakan barang dan jasa yang dibutuhkan hanya dengan menulis cek. Di negara-negara maju sebagian besar dari pembelian barang dan jasa dibayar dengan cek. Oleh sebab itu saldo rekening koran / giro mempunyai status yang sama dengan

currency sehingga harus dimasukkan dalam pengertian uang beredar. Saldo rekening koran / giro yang dimiliki oleh masyarakat disebut uang giral atau *demand deposit*. Sedangkan uang beredar yang didefinisikan sebagai uang kartal plus uang giral (*Currency + demand deposits*) disebut uang dalam arti sempit atau *Narrow Money*, dan untuk ini biasanya menggunakan simbol M1. meskipun M1 sudah merupakan perluasan definisi yang pertama tadi, tetapi karena ada beberapa konsep yang lebih luas lagi, maka pengertian tersebut masih disebut uang dalam arti sempit, yaitu:

$$M1 = C + DD$$

Dimana:

C = *Currency* (Uang Kartal)

DD = *Demand Deposits* (Uang Giral)

Pengertian M1 bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung dapat digunakan untuk pembayaran bisa diperluas dan mencakup alat-alat yang mendekati uang, misalnya deposito berjangka (*Time Deposit*) dan simpanan tabungan (*Saving Deposits*) pada bank-bank. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya juga merupakan daya beli potensial bagi pemiliknya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek dalam penggunaannya. Ekonom Milton Friedman menyebutnya kekayaan semacam ini *Temporary Abodes of purchasing Power* atau tempat manusia menginap. Sementara bagi daya beli, sehingga selain M1 juga harus mengamati M2 yang diartikan sebagai M1 plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank, karena perkembangan M2 inflasi juga dapat

mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya:

$$M2 = M1 + TD + SD$$

Dimana:

TD = *Time Deposits* (Deposito Berjangka)

SD = *Saving Deposits* (Saldo tabungan)

Orang menempatkan uangnya dalam TD atau SD karena simpanan ini memberikan bunga, M2 juga disebut uang beredar dalam arti luas atau *Broad Money*. Definisi uang beredar yang lebih luas lagi adalah M3, yang mencakup semua TD dan SD, besar kecil rupiah atau dollar milik penduduk pada bank atau lembaga-lembaga keuangan non bank. Seluruh TD dan SD ini disebut uang kuasi atau (*Quasi Money*)

$$M3 = M1 + QM$$

Dimana:

QM = *Quasy Money* (Uang Kuasi) (Boediono, 1996:120-121).

2.8 Hubungan Inflasi Dengan Jumlah Uang Beredar

Menurut teori kuantitas uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher, menekankan bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya ke atas harga-harga kearah yang sama. Misalkan uang beredar bertambah sebanyak 5%, maka tingkat harga juga akan bertambah sebesar 5%. Atau sebaliknya jika uang beredar berkurang sebanyak 5%, maka tingkat harga akan berkurang menurut kelajuan yang sama. Persamaan pertukaran tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Dimana:

M = Jumlah uang (*Money of Circulation*)

V = Kecepatan peredaran uang (*velocity of Circulation*)

P = Tingkat harga (*Level of Trade*)

T = Jumlah Barang-Barang yang tersedia

MV = Jumlah Uang Efektif, maksudnya jumlah uang yang benar-benar beredar sehingga umumnya menjadi

$$MV + M'V' = PT$$

Dimana:

M' = Uang Giral

V' = Kecepatan Beredarnya Uang Giral.

Andaikata uang tidak mempengaruhi sektor barang maka uang tersebut dinamakan netral, maka terjadilah yang dinamakan keseimbangan moneter. Keadaan keseimbangan moneter demikian dicapai pada MV yang tidak berubah. Apabila kecepatan uang yang beredar sangat cepat (V) dan jumlah uang yang beredar sangat besar maka berdasarkan persamaan diatas akan meningkat pula tingkat permintaan masyarakat akan barang-barang, sehingga secara tidak langsung harga-harga barang-barang tersebut meningkat sehingga timbul dengan apa yang dinamakan sebagai inflasi (Winanrdi, 1995:334).

2.9 Sistem Kurs Valuta Asing Dengan Inflasi

Hubungan antara inflasi dengan kurs valuta asing tergantung dari sifat pasar, apabila transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di pasar,

maka kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Di dalam pasar bebas perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran keluar, sedangkan penawaran valuta asing berasal dari eksportir. Suatu mata uang dikatakan kuat apabila transaksi kredit lebih besar dari transaksi debet, sebaliknya dikatakan lemah apabila mengalami defisit. Transaksi debet dan kredit tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk harga, pendapatan dan tingkat bunga. Segala sesuatu yang mempengaruhi tiga faktor ini baik dari dalam maupun dari luar negeri akan mempengaruhi permintaan dan penawaran yang pada gilirannya akan mempengaruhi kurs valuta asing. Makin tinggi tingkat pertumbuhan (relatif terhadap negara lain), makin besar kemungkinan untuk impor yang berarti makin besar pula permintaan akan valuta asing maka kurs valuta asing cenderung akan naik. Demikian pula dengan Inflasi akan menyebabkan impor naik dan ekspor turun yang akan mengakibatkan kurs valuta asing naik. Sedangkan kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri cenderung menarik modal masuk dari luar negeri maka kurs valuta asing akan turun. dari uraian tersebut tampak bahwa semua kegiatan ekonomi dan kebijakan pemerintah (moneter dan fiskal) yang mempengaruhi pendapatan, harga serta tingkat bunga secara tidak langsung akan mempengaruhi kurs valuta asing (Nopirin, 1996:172).

2.10 Pengertian Saluran Distribusi

Saluran distribusi sebagai struktur unit-unit organisasi antar perusahaan, agen-agen, dealer-dealer ekstra perusahaan, grosir dan eceran, melalui mana komoditi, produk atau jasa-jasa dipasarkan (Ali, 1995:46).

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri (Swastha, 1998:200).

2.11 Jenis-Jenis Saluran Distribusi

Adapun jenis-jenis saluran distribusi yang sering di gunakan produsen dalam mendistribusikan hasil produksinya terbagi dalam dua kategori dimana saluran 1 sampai 5 merupakan saluran distribusi untuk barang konsumsi sedangkan saluran 6 sampai 9 merupakan saluran distribusi untuk barang industri, sebagai berikut:

- a. Saluran 1, merupakan bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan perantara. produsen dapat menjual barang yang dihasilkan langsung kepada konsumen tanpa menggunakan perantara atau agen penjualan.
- b. Saluran 2, mirip dengan saluran 1 dan juga disebut saluran distribusi langsung. Pada saluran distribusi ini pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen, dan ada pula beberapa produsen mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen.
- c. Saluran 3, saluran distribusi semacam ini banyak dipakai oleh produsen barang konsumsi yang dinamakan saluran distribusi tradisional. Pada saluran

distribusi ini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja dan tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja.

- d. Saluran 4, Pada saluran distribusi ini produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar kemudian dijual kepada toko-toko kecil. Agen yang terlibat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan.
- e. Saluran 5, Pada saluran distribusi ini produsen memilih agen (agen penjualan atau agen pabrik) sebagai penyalurnya dan menjalankan kegiatan perdagangan, sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar.
- f. Saluran 6, ialah saluran distribusi barang industri dari produsen kepada pemakai industri ini merupakan saluran yang paling pendek dan disebut sebagai saluran distribusi langsung. Biasanya saluran distribusi langsung ini dipakai oleh produsen bilamana transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar, misalnya pesawat terbang dan lokomotif.
- g. Saluran 7, saluran distribusi ini digunakan oleh produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan peralatan ekstra kecil dimana menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya.
- h. Saluran 8, saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan bahwa unit penjualannya terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu faktor penyimpanan pada penyalur perlu dipertimbangkan pula.

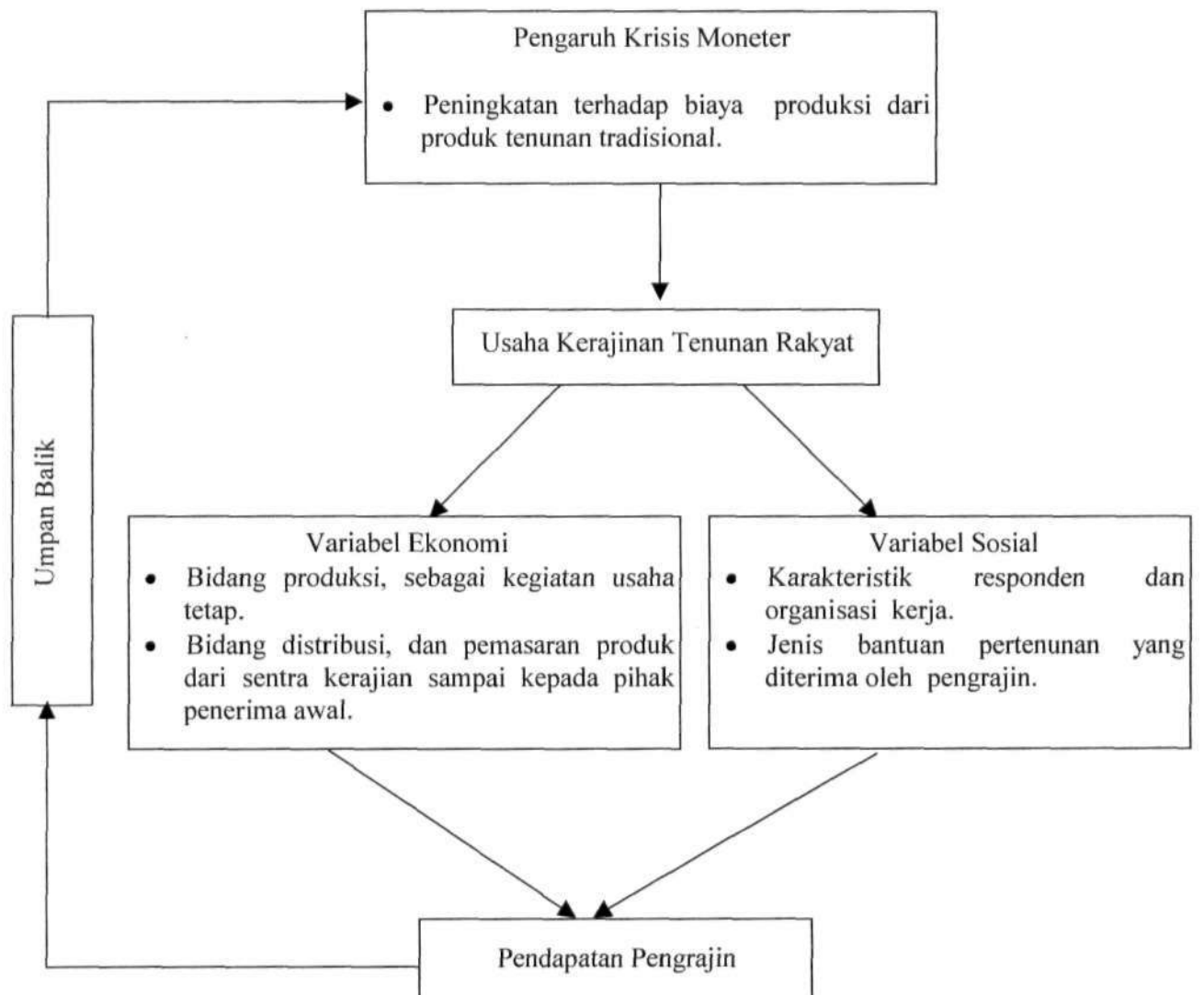
- i. Saluran 9, saluran distribusi ini biasanya digunakan oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran atau bagi perusahaan yang ingin memperkenalkan produk baru maupun yang ingin memasuki daerah pemasaran baru lebih suka menggunakan agen (Swastha, 1998:201).

2.12 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

PENGARUH KRISIS MONETER TERHADAP USAHA KERAJINAN TENUNAN RAKYAT DI KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR



2.13 Hipotesa

Krisis moneter diduga memberi dampak kepada penurunan tingkat pendapatan para pengusaha kerajinan tenunan tradisional di kota Kupang.